

MODEL KELEMBAGAAN PENGEMBANGAN WISATA DI GUGUS PULAU SAPEKEN SECARA BERKELANJUTAN

Romadhon, A
Jurusan Ilmu Kelautan, Universitas Trunojoyo Madura
aromadhon46@gmail.com

Disampaikan pada Seminar Nasional Ekowisata di Universitas Widyagama, Malang 12 November 2013

ABSTRACT

Sapeken archipelago has several ecosystem as small island destination and tourism capital. Tourism planning at Sapeken archipelago need management decision making implies choices between different alternatives, while problem solving has to do with the process of generating these alternatives. Based on these fact, planning of tourism at Sapeken archipelago needs an integrated stakeholders to creating sustainable tourism. The corresponding purpose of this study is to address this problem, using the method Interpretatif Structural Modelling (ISM). The result showed planning of tourism activities at Sapeken archipelago need co-management as most realistic approach to elaborate all stakeholder needs. Tourism planning based institutional at Sapeken archipelago need

ABSTRAK

Perencanaan wisata berbasis kelembagaan di gugus Pulau Sapeken yang perlu dipertimbangkan dalam mewujudkan sustainable development adalah 1) pelaku penyelenggara adalah pemerintah daerah dan investor pariwisata bahari, 2) tujuan program untuk meningkatkan pendapatan daerah, 3) tolok ukur untuk meningkatnya taraf hidup masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, 4) kendala utama yaitu kurangnya pembinaan terhadap nelayan, dan 5) aktivitas yang dibutuhkan adalah memfasilitasi akses modal pengembangan, melaksanakan promosi keanekaragaman hayati pesisir dan pulau-pulau kecil, mendirikan sarana pelayanan dan memfasilitasi penyediaan data dan informasi memegang peranan penting pada perencanaan wisata berbasis kelembagaan di gugus Pulau Sapeken

Kata Kunci : Gugus Pulau Sapeken, wisata berkelanjutan, ISM, co-management, perencanaan wisata berbasis kelembagaan

PENDAHULUAN

Gugus Pulau Sapeken merupakan himpunan pulau – pulau kecil kecil yang secara struktural saling terkait, memiliki sejumlah ekosistem laut penting seperti terumbu karang, mangrove, lamun, pantai dan sumberdaya perikanan (FDC-INNR, 2008). Keberadaan potensi berupa ekosistem laut tersebut menjadikan gugus Pulau Sapeken memiliki kesesuaian dan daya dukung bagi pengembangan sejumlah wisata laut seperti wisata selam, wisata snorkeling, wisata pancing, wisata mangrove dan wisata pantai (Romadhon, *et. al*, 2013b). Bagi kawasan pulau – pulau kecil upaya pengembangan secara berkelanjutan, Robertico (2004); Bengen dan Retraubun (2006) menyatakan strategi yang perlu dilakukan berupa kegiatan wisata yang berkelanjutan (*sustainable tourism*).

Strategi *sustainable tourism* sangat mungkin dilakukan sebagai upaya pemanfaatan sekaligus perlindungan terhadap segenap potensi yang ada di gugus Pulau Sapeken.

Kegiatan wisata merupakan suatu proses kompleks di dalamnya terdapat interaksi antara wisatawan, masyarakat dan sumberdaya (Farrell dan Twining-Ward, 2004). Terkait dengan perencanaan kegiatan ekowisata (*ecotourism*), Romadhon *et. al* (2013a) menjelaskan, interaksi antara masyarakat dan sumberdaya melalui penilaian *socio ecological system* (SES) menunjukkan kondisi beberapa *natural capital asset* yang ada masih mampu menyediakan sejumlah jasa ekosistem sebagai daya tarik ekowisata gugus Pulau Sapeken. Lebih lanjut untuk mempertahankan kualitas pengalaman rekreasi yang tidak hanya didasarkan pada kualitas ekologi, interaksi wisatawan (kelompok pengguna) dan penduduk harus tetap juga dijaga (Mihalic, 2000).

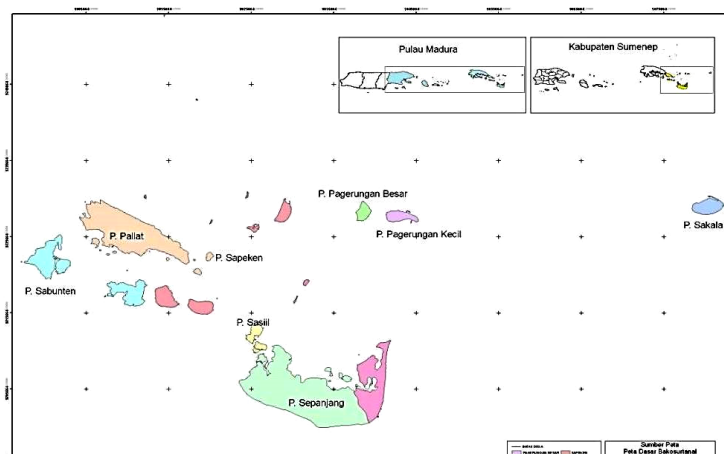
Langkah yang diperlukan untuk mewujudkan kegiatan wisata berkelanjutan di gugus Pulau Sapeken sebagai suatu proses yang kompleks serta keterlibatan *multi stakeholder*, dilakukan melalui perencanaan strategis yang mampu mengakomodasi segenap hal tersebut. Kenyataan tersebut menjadikan dalam perencanaan wisata di gugus Pulau Sapeken membutuhkan perencanaan berbasis kelembagaan. Penerapan perencanaan wisata berbasis kelembagaan lebih lanjut menurut Gunderson dan Holling (2002) bertujuan untuk menciptakan ketahanan dan kapasitas adaptif melalui pembelajaran serta memberikan pengalaman baru terhadap pengguna sumberdaya cara terbaik untuk menggunakan dan mengelola sumber daya.

Berangkat dari pemahaman tersebut dalam perencanaan wisata yang sesuai dengan karakteristik gugus Pulau Sapeken sebagai pulau kecil dengan segenap keterbatasannya perlu dilakukan kajian terhadap tujuan, kendala dan elemen lembaga terkait untuk mewujudkan wisata berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada kawasan gugus Pulau Sapeken. Data yang dikumpulkan meliputi : 1) data sekunder melalui studi literatur dan hasil laporan terkait; 2) data primer diperoleh melalui wawancara terhadap masyarakat dengan menggunakan sarana blanko isian (kuesioner).



Gambar 1. Gugus Pulau Sapeken sebagai lokasi penelitian

Analisa

Analisa yang digunakan dalam perencanaan wisata berbasis kelembagaan di gugus Pulau Sapeken adalah Permodelan Interpretasi Struktural (*Interpretatif Structural Modelling - ISM*). Marimin (2005) menjelaskan model ISM dilakukan melalui 3 tahapan yaitu : 1) menentukan elemen penting dalam wisata berkelanjutan; 2) menguraikan elemen-elemen terpilih menjadi sub elemen yang lebih rinci; 3) melakukan pengolahan matrik dan dilanjutkan dengan pengelompokan subelemen berdasarkan *Driver Power* (DP) dan (*Dependence* (D)).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Elemen

Perencanaan wisata berbasiskelembagaan di gugus Pulau Sapeken dapat diuraikan atas elemen-elemen yang terdiri dari : 1) Elemen pelaku (masyarakat yang terpengaruh);2) Elemen kebutuhan dari program;3) Elemen tujuan program; 4) Elemen kendala utama;5) Elemen perubahan yang dimungkinkan; 6) Elemen tolok ukur untuk menilai setiap tujuan; 7) Elemen aktivitas yang dibutuhkan guna perencanaan tindakan;8) Ukuran aktivitas guna mengevaluasi hasil yang dicapai untuk setiap aktivitas; dan 9) Lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program. Adapun pada penelitian ini dasar pertimbangan dalam pemilihan elemen dari program yang ingin dicapai adalah elemen dominan yang sudah dikonsultasikan dengan pakar dalam perencanaan wisata berbasiskelembagaan di gugus Pulau Sapeken.

Perencanaan wisata berbasiskelembagaan di gugus Pulau Sapeken dapat diuraikan atas 5 elemen yang terdiri dari (1) Elemen Pelaku, (2) Elemen Tujuan, (3) Elemen Tolok Ukur, (4) Elemen Kendala, dan (5) Elemen Aktifitas yang dibutuhkan guna perencanaan tindakan.

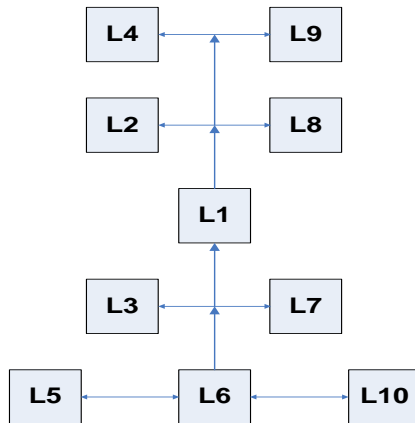
Sistem kelembagaan pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Weda

Strukturisasi sub-elemenperencanaan wisata berbasiskelembagaan di gugus Pulau Sapeken antara lain :

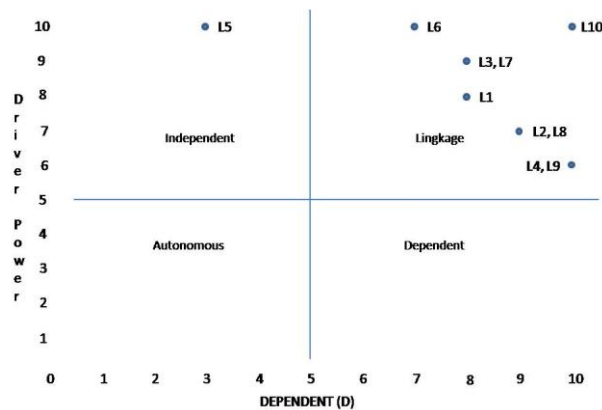
- *Elemen pelakusistemperencanaan wisata berbasiskelembagaan di gugus Pulau Sapeken*

Strukturisasi elemen pelaku, yang terdiri dari 10 sub-elemen, dengan menggunakan teknik ISM dan melalui penilaian V, A, X, dan O akan menghasilkan matriks *reachability*, struktur model hirarki, dan klasifikasi subelemen. Sub elemen pelaku dilambangkan sebagai berikut:

- | | | | |
|---------------------------------|------|------------------------------|-------|
| 1. Kelompok nelayan | (L1) | 6. Wisatawan dalam negeri | (L6) |
| 2. Pengusaha industri perikanan | (L2) | 7. Wisatawan luar negeri | (L7) |
| 3. Tokoh masyarakat | (L3) | 8. Lembaga keuangan dan Bank | (L8) |
| 4. Pemerintah daerah | (L4) | 9. Investor wisata bahari | (L9) |
| 5. Pemerintah pusat | (L5) | 10. Perguruan Tinggi | (L10) |



Gambar 2. Diagram model struktur hirarki elemen pelaku sistem perencanaan wisata berbasiskelembagaan di gugus Pulau Sapeken



Gambar 3. Grafik hubungan Driver Power (DP) dan Dependence (D) elemen pelaku sistem perencanaan wisata berbasis kelembagaan di gugus Pulau Sapeken

Pada diagram dan grafik yang ditampilkan pada gambar 2 dan 3, menjelaskan bahwa elemen pelaku sistem pengembangan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil pada level I adalah pemerintah daerah dan investor pariwisata bahari, level II adalah pengusaha industri perikanan dan lembaga keuangan bank, level III adalah kelompok nelayan, level IV adalah tokoh masyarakat dan wisatawanluar negeri, dan level V adalah pemerintah pusat, wisatawan dalam negeri dan perguruan tinggi.

Kawasan gugus Pulau Sapeken merupakan kawasan yang dalam pengelolaan dan pemanfaatan membutuhkan keterpaduan (*integration*), terkait dengan beragamnya ekosistem dan pemanfaatan yang dilakukan. Kondisi tersebut menjadikan pengelolaan berupa pengembangan kawasan di gugus Pulau Sapeken merupakan kegiatan yang mengelaborasi sejumlah kepentingan. Dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan dapat dipahami sebagai hak untuk mengatur pola penggunaan internal dan mengubah sumber daya dengan membuat perbaikan (Ostrom dan Schlager, 1996). Kegiatan pengelolaan ini dapat ditampilkan oleh satu *stakeholder* atau bersama-sama oleh kelompok atau sebagai hasil kerjasama antara berbagai kelompok. Manajemen kolaboratif, atau *co-manajemen*, telah didefinisikan sebagai

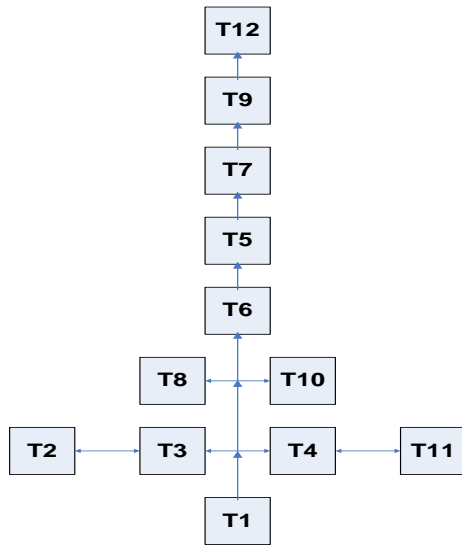
pembagian kekuasaan dan tanggung jawab pengguna sumberdaya antara pemerintah dan lokal (Berkes, 2009). Singleton (1998) mendefinisikan *co-manajemen* sebagai istilah yang diberikan kepada sistem yang menggabungkan pemerintahan sebagai kontrol dengan lokal, pengambilan keputusan yang terdesentralisasi dan akuntabilitas, idealnya dengan menggabungkan kekuatan dan mengurangi kelemahan masing-masing.

Mengacu pada hal tersebut, dalam perencanaan wisata di gugus Pulau Sapeken, sebagai bentuk mendesentralisasikan tanggungjawab dan wewenang dalam pengelolaan sumberdaya, diperlukan pelibatan segenap *stakeholder* terkait dari pemerintah daerah, investor pariwisataabahari, pengusaha industri perikanan, lembaga keuangan dan bank, kelompok nelayan, tokoh masyarakat, wisatawan luar negeri, pemerintah pusat, wisatawan dalam negeri dan perguruan tinggi. Desentralisasi tanggungjawab dapat menjadikan keberlangsungan segenapekosistem yang ada di gugus Pulau Sapeken lebih terjamin dengan keterlibatan *stakeholder* terkait baik sebagai pengguna sekaligus pengawas. *Stakeholder* dalam kapasitasnya sebagai pengguna (*users*) akan berusaha dalam pemanfaatan sumberdaya tetap memperhatikan kaidah-kaidah dan mentaati segenap aturan yang telah ditetapkan secara bersama pada proses perencanaan, sekaligus mengawasi terjadinya bentuk pemanfaatan yang merugikan. Lebih lanjut pelaksanaan *co-management* tidak hanya terkait dengan pembagian tanggungjawab pengelolaan, tetapi juga mensyaratkan adanya kerjasama, partisipasi, peningkatan pengetahuan lokal, dan penggunaan pengetahuan ekologi tradisional dan pengetahuan ilmiah (Miller *et al*, 2010)

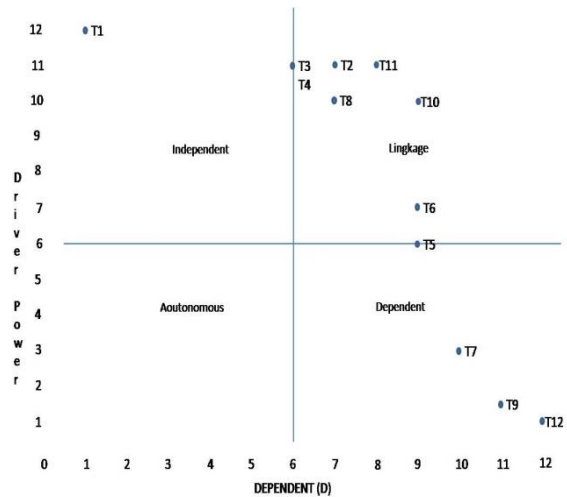
- *Elemen tujuan program perencanaan wisata berbasiskelembagaan di gugus Pulau Sapeken*

Strukturisasi elemen tujuan yang terdiri dari 12 sub elemen, dengan menggunakan teknik ISM dan melalui penilaian V, A, X, dan O akan menghasilkan matriks *reachability*, struktur model hirarki, dan klasifikasi sub-elemen. Sub-elemen tujuan dilambangkan sebagai berikut :

1	Mewujudkan pengembangan wisata	(T1)	7	Memperluas lapangan kerja	(T7)
2	Meningkatkan produktivitas perikanan tangkap	(T2)	8	Meningkatkan diversifikasi produk perikanan tangkap	(T8)
3	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisirdanpulau-pulaukecil	(T3)	9	Meningkatkan kegiatan perekonomian daerah pesisirdanpulau-pulaukecil	(T9)
4	Meningkatkan pelayanan jasa lingkungan di pesisir dan pulau-pulau kecil	(T4)	10	Meningkatkan minat investor kepariwisataan	(T10)
5	Meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	(T5)	11	Melakukan pengembangan teknologi	(T11)
6	Mewujudkan pemanfaatan umberdaya yang berkelanjutan	(T6)	12	Meningkatkan pendapatan daerah	(T12)



Gambar 4. Diagram model struktur hirarki elemen tujuan program sistem perencanaan wisata berbasis kelembagaan di gugus Pulau Sapeken



Gambar 5. Grafik hubungan *Driver Power* (DP) dan *Dependence* (D) elemen tujuan program sistem perencanaan wisata berbasis kelembagaan di gugus Pulau Sapeken

Pada diagram dan grafik yang ditampilkan pada gambar 4 dan 5 menjelaskan bahwa elemen tujuan program sistem perencanaan wisata berbasis kelembagaan di gugus Pulau Sapeken pada level I adalah meningkatkan pendapatan daerah, level II adalah meningkatkan kegiatan perekonomian daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, level III adalah memperluas lapangan kerja, level IV adalah meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, level V adalah mewujudkan pemanfaatan SD yang berkelanjutan, level VI adalah meningkatkan diversifikasi produk perikanan tangkap dan meningkatkan minat investor kepariwisataan, level VII adalah meningkatkan produktivitas perikanan tangkap, meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, meningkatkan pelayanan jasa lingkungan di pesisir dan pulau-pulau kecil dan melakukan pengembangan teknologi, sedangkan level VIII adalah mewujudkan pengembangan wisata.

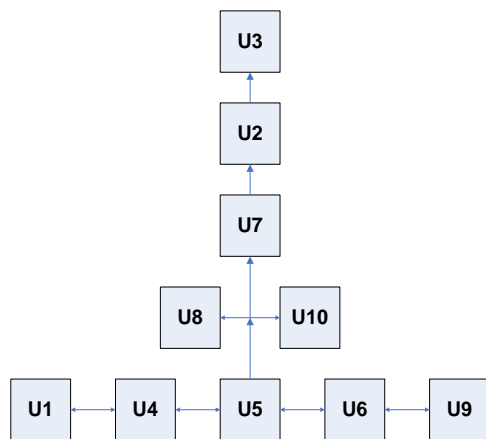
Berdasarkan hirarki di atas menunjukkan bahwa tujuan program dalam meningkatkan *pendapatan masyarakat* memegang peranan penting pada perencanaan wisata berbasis kelembagaan di gugus Pulau Sapeken. Pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan sebuah daerah yang dapat dijadikan kawasan konservasi terutama didedikasikan untuk perlindungan dan pemeliharaan keanekaragaman hayati, sumber daya alam dan budaya yang diasosiasikan, atau dikelola melalui upaya hukum (Ladkinet *al*, 2002). Dalam jangka panjang, pelaksanaan *co-management* pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil diyakini akan memberikan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik melalui : 1) Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya sumberdaya pesisir dan laut dalam menunjang kehidupan; 2) Peningkatan kemampuan masyarakat, sehingga mampu berperan serta dalam setiap tahapan pengelolaan secara terpadu; dan 3) Peningkatan pendapatan

masyarakat dengan bentuk-bentuk pemanfaatan yang lestari dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Terkait dengan hal tersebut diperlukan perbaikan yang mendasar di dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan sumberdaya alam pesisir dan pulau-pulau kecil.

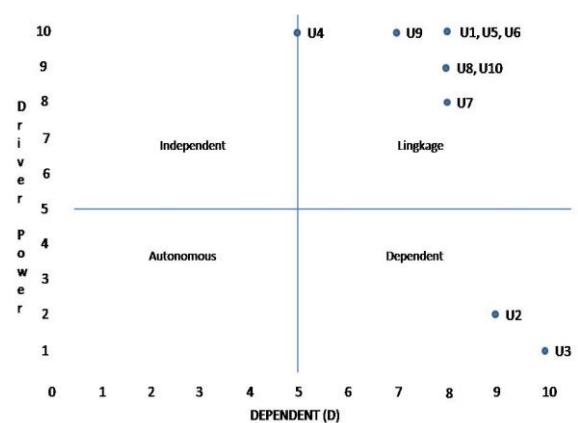
- *Elemen tolok ukur sistem perencanaan wisata berbasiskelembagaan di gugus Pulau Sapeken*

Strukturisasi elemen tolok ukur, yang terdiri dari 10 subelemen, dengan menggunakan teknik ISM dan melalui penilaian V, A, X, dan O akan menghasilkan matriks *reachability*, struktur model hirarki, dan klasifikasi subelemen. Sub elemen tolok ukur dilambangkan sebagai berikut:

- | | |
|--|---|
| 1. Meningkatnya industri pariwisata (U1) | 6. Meningkatnya pendapatan masyarakat pesisirdanpulau-pulaukecil (U6) |
| 2. Meningkatnya jumlah hasil tangkapan (U2) | 7. Meningkatnya jumlah investor dan investasi di pesisir dan pulau-pulau kecil (U7) |
| 3. Meningkatnya taraf hidup masyarakat pesisirdanpulau-pulaukecil (U3) | 8. Meningkatnya diversifikasi produk perikanan (U8) |
| 4. Meningkatnya produktifitas pemanfaatan sumberdayaalam (U4) | 9. Meningkatnya jumlah permodalan kegiatan perikanan tangkap (U9) |
| 5. Meningkatnya mutu produk perikanan (U5) | 10. Harga produk perikanan yang stabil (U10) |



Gambar 6. Diagram model struktur hirarki elemen tolok ukur program sistem perencanaan wisata berbasiskelembagaan di gugus Pulau Sapeken



Gambar 7. Grafik hubungan *Driver Power (DP)* dan *Dependence(D)* elemen tolok ukur program sistem perencanaan wisata berbasiskelembagaan di gugus Pulau Sapeken

Pada diagram dan grafik yang ditampilkan pada gambar 6 dan 7, menjelaskan bahwa elemen tolok ukur program sistem pengembangan perencanaan wisata berbasiskelembagaan di gugus Pulau Sapeken pada level I adalah meningkatnya taraf hidup masyarakat pesisirdanpulau-pulaukecil, level II adalah Meningkatnya jumlah hasil tangkapan, level III adalah meningkatnya jumlah investor dan investasi di pesisir dan pulau-pulau kecil, level IV adalah

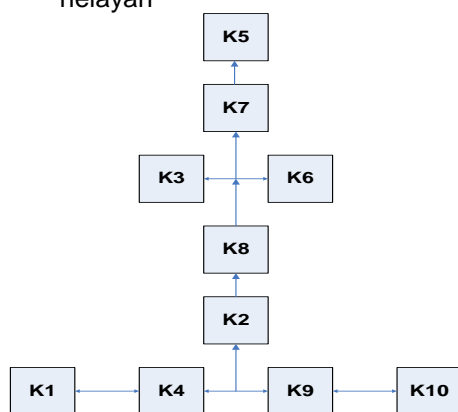
meningkatnya diversifikasi produk perikanan dan harga produk perikanan yang stabil, sedangkan level V adalah meningkatnya industri pariwisata, Meningkatnya produktifitas pemanfaatan sumberdayaalam, meningkatnya mutu produk perikanan, dan meningkatnya jumlah permodalan kegiatan perikanan tangkap.

Gugus Pulau Sapeken merupakan sebuah kawasan yang terdiri dari sejumlah ekosistem memiliki potensi perikanan yang besar. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada sumberdaya perikanan ini. Terkait dengan perencanaan wisata berbasis kelembagaan di gugus Pulau Sapeken dengan salah satu tujuannya adalah peningkatan pendapatan, tolakukur yang relevan untuk digunakan berupa peningkatan produksi perikanan. Peningkatan produksi perikanan ini tidak semata-mata berupa peningkatan hasil tangkap tapi diutamakan berupa diversifikasi produk perikanan.

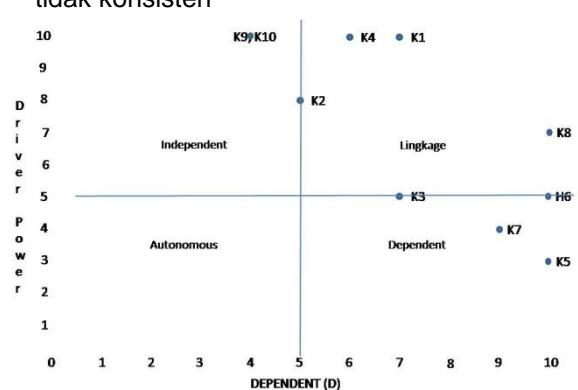
- *Elemen kendala utama sistem perencanaan wisata berbasiskelembagaan di gugus Pulau Sapeken*

Strukturisasi elemen kendala utama, yang terdiri dari 10 sub elemen, dengan menggunakan teknik ISM dan melalui penilaian V, A, X, dan O akan menghasilkan matriks *reachability*, struktur model hirarki, dan klasifikasi subelemen. Sub elemen kendala dilambangkan sebagai berikut :

- | | |
|---|--|
| 1. Nelayan kurang berdaya dalam penentuan harga perikanan (K1) | 6. Lemahnya sistem kelembagaan di pesisir dan pulau-pulau kecil (K6) |
| 2. Nelayan kurang konsisten menjaga mutu perikanan tangkap (K2) | 7. Lemahnya koordinasi antar pihak terkait (K7) |
| 3. Lemahnya nelayan dapat mengakses modal pada lembaga keuangan dan bank (K3) | 8. Tingginya kebutuhan ekspor perikanan tangkap (K8) |
| 4. Lemahnya kemampuan masyarakat dalam mengelola sumberdayaalampesisirdanpulau-pulau kecil (K4) | 9. Peraturan investasi daerah yang kurang mendukung (K9) |
| 5. Kurangnya pembinaan terhadap nelayan (K5) | 10. Kebijakan pemerintah yang tidak konsisten (K10) |



Gambar 8 Diagram model struktur hirarki elemen kendala utama sistem perencanaan wisata berbasiskelembagaan di gugus Pulau Sapeken



Gambar 9. Grafik hubungan *Driver Power* (DP) dan *Dependence* (D) elemen kendala utama sistem perencanaan wisata berbasis kelembagaan di gugus Pulau Sapeken

Pada diagram dan grafik yang ditampilkan pada gambar 8 dan 9, menjelaskan bahwa elemen kendala program sistem pengembangan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil pada level I adalah kurangnya pembinaan terhadap nelayan, level II adalah lemahnya koordinasi antar pihak terkait, level III adalah lemahnya nelayan dapat mengakses modal pada lembaga keuangan dan bank dan lemahnya sistem kelembagaan di pesisir dan pulau-pulau kecil, level IV adalah tingginya kebutuhan ekspor perikanan tangkap, level V adalah nelayan kurang konsisten menjaga mutu perikanan tangkap, dan level VI adalah nelayan kurang berdaya dalam penentuan harga perikanan, lemahnya kemampuan masyarakat dalam mengelola SDA pesisir dan pulau-pulau kecil, peraturan investasi daerah yang kurang mendukung dan kebijakan pemerintah yang tidak konsisten.

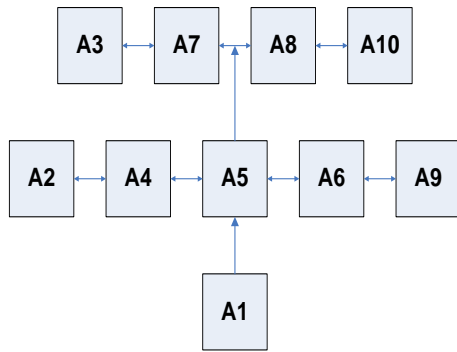
Perencanaan wisata berbasis kelembagaan di gugus Pulau Sapeken diharapkan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat khususnya nelayan sesuai dengan kapasitas ekonomi yang sesuai dengan dayadukung serta kebijakan social ekonomi yang berpihak kepada kelompok yang terpinggirkan. Kebijakan social ekonomi perlu direkayasa-ulang, yakni diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan sekaligus untuk menjaga kelestarian sumberdaya sehingga kegiatan social ekonomi dapat dipercepat dan dilakukan secara berkelanjutan.

Kebijakan pembangunan perlu memberikan keberpihakan kepada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil agar kelompok masyarakat yang selama ini kurang diperhatikan dapat segera mengejar ketertinggalan dari kelompok masyarakat lainnya sehingga tujuan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan yang adil dapat diwujudkan (Dahuriet al, 2000).

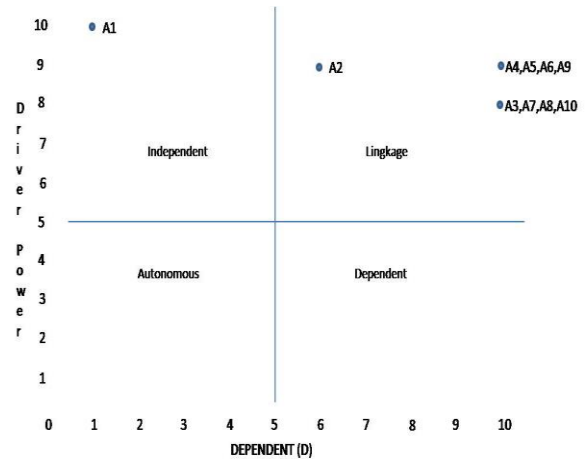
- *Elemen aktifitas yang dibutuhkan dalam perencanaan wisata berbasis kelembagaan di gugus Pulau Sapeken*

Strukturisasi elemen aktivitas yang dibutuhkan, yang terdiri dari 10 sub elemen, dengan menggunakan teknik ISM dan melalui penilaian V, A, X, dan O akan menghasilkan matriks *reachability*, struktur model hirarki, dan klasifikasi sub elemen. Sub elemen aktivitas yang dibutuhkan dilambangkan sebagai berikut :

- | | |
|---|--|
| 1. Membuat kebijakan yang konsisten (A1) | 6. Memberikan pengawasan pemanfaatan sumberdayaalam (A6) |
| 2. Memfasilitasi pelaksanaan pendidikan (A2) | 7. Melaksanakan promosi keanekaragaman hayati pesisir dan pulau-pulau kecil (A7) |
| 3. Memfasilitasi akses modal pengembangan (A3) | 8. Mendirikan sarana pelayanan (A8) |
| 4. Memfasilitasi penelitian dan pengembangan bekerjasama dengan perguruan tinggi (A4) | 9. Melakukan koordinasi antar instansi terkait (A9) |
| 5. Memfasilitasi tersedianya infrastruktur yang memadahi (A5) | 10. Memfasilitasi penyediaan data dan informasi (A10) |



Gambar 10. Diagram model struktur hirarki elemen aktivitas yang dibutuhkan guna perencanaan tindakan program sistem perencanaan wisata berbasiskelembagaan di gugus Pulau Sapeken



Gambar 11. Grafik hubungan *Driver Power* (DP) dan *Dependence*(D) elemen aktivitas yang dibutuhkan guna perencanaan tindakan program sistem perencanaan wisata berbasiskelembagaan di gugus Pulau Sapeken

Pada diagram dan grafik yang ditampilkan pada gambar 10 dan 11, menjelaskan bahwa elemen aktivitas yang dibutuhkan guna perencanaan wisata berbasiskelembagaan di gugus Pulau Sapeken pada level I adalah memfasilitasi akses modal pengembangan, melaksanakan promosi keanekaragaman hayati pesisir dan pulau-pulau kecil, mendirikan sarana pelayanan dan memfasilitasi penyediaan data dan informasi, level II adalah memfasilitasi pelaksanaan pendidikan, memfasilitasi penelitian dan pengembangan bekerjasama dengan perguruan tinggi, memfasilitasi tersedianya infrastruktur yang memadai, memberikan pengawasan pemanfaatan sumberdaya alam dan melakukan koordinasi antar instansi terkait, sedangkan level III adalah membuat kebijakan yang konsisten.

Selama ini pengelolaan sumberdaya sering merupakan *the missing ingredient* dalam mewujudkan partisipasi masyarakat yang aktif dan kreatif. Secara sederhana pemberdayaan mengacu kepada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan akses dan control atas sumber-sumber hidup yang penting. Upaya masyarakat untuk melibatkan diri dalam proses pembangunan melalui *power* yang dimilikinya merupakan bagian dari pembangunan manusia (*personal/human development*). Pembangunan manusia merupakan proses pembentukan pengakuan diri (*self-respect*), percaya diri (*self-confident*) dan kemandirian (*self-reliance*) dapat bekerjasama dan toleran terhadap sesamanya dengan menyadari potensi yang dimilikinya. Hal ini dapat terwujud dengan menimba ilmu dan ketrampilan baru, serta aktif berpartisipasi di dalam pembangunan ekonomi, social dan politik dan komunitas mereka (Richins dan Pearce, 2000; Hall, 1999).

Terkait dengan hal tersebut tersedianya infrastruktur yang memadai akan mengurangi *missing ingredient* dalam perencanaan wisata berbasis kelembagaan di gugus Pulau Sapeken, melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, setiap *stakeholder* yang terlibat memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, merumuskan solusi permasalahan yang ada sekaligus

menggagas kegiatan yang diperlukan dalam perencanaan wisata di gugus Pulau Sapeken.

KESIMPULAN

Berdasarkan perencanaan wisata berbasis kelembagaan di gugus Pulau Sapeken menunjukkan, bahwa :

1. Perencanaan wisata berbasis kelembagaan di gugus Pulau Sapeken melalui pendekatan *co-management* merupakan pendekatan yang paling realistis untuk dilakukan dalam mengkolaborasi eigen kepentingan *stakeholder* dengan mengedepankan paradigma pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi melainkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).
2. Perencanaan wisata berbasis kelembagaan di gugus Pulau Sapeken yang perlu dipertimbangkan dalam mewujudkan *sustainable development* adalah 1) pelaku penyelenggara adalah pemerintah daerah dan investor pariwisata bahari, 2) tujuan program untuk meningkatkan pendapatan daerah, 3) tolok ukur untuk meningkatnya taraf hidup masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, 4) kendala utama yaitu kurangnya pembinaan terhadap nelayan, dan 5) aktivitas yang dibutuhkan adalah memfasilitasi akses modal pengembangan, melaksanakan promosi keanekaragaman hayati pesisir dan pulau-pulau kecil, mendirikan sarana pelayanan dan memfasilitasi penyediaan data dan informasi memegang peranan penting pada perencanaan wisata berbasis kelembagaan di gugus Pulau Sapeken.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 2008. Laporan Ilmiah Ekspedisi Zooxanthellae VIII. Kondisi dan Potensi Ekosistem Terumbu Karang Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Propinsi Jawa Timur. FDC – IPB dan INNR.
- Bengen, DG. Retraubun, AWS. 2006. Menguak Realitas dan Urgensi Pengelolaan Berbasis Eko-Sosio Sistem Pulau-Pulau Kecil. Pusat Pembelajaran dan Pengembangan Pesisir dan Laut (P4L). ISBN 979-98867-2-4
- Berkes, F. 2009. Evolution of co-management: role of knowledge generation, bridging organization and social learning. *Journal of Environmental Management* 90, 1692-1702.
- Dahuri, R. Rais, J. Ginting, SP. 2000. *Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Secara Terpadu*. Paramitra. Jakarta
- Farrell, BH. Twining-Ward, L. 2004. Reconceptualizing tourism. *Annals of Tourism Research*. 31 (2). 274–295
- Gunderson, LH. Holling, CS. (Eds.). 2002. *Panarchy: Understanding Transformations in Human and Natural Systems*. Islands Press, Washington, DC
- Hall, C M. 1999. Rethinking collaboration and partnership: a public policy perspective. *Journal of Sustainable Tourism*, 7(4), 274-289

- Ladkin, A. Bertramini, AM. 2002. Collaborative tourism planning: a case study of Cusco, Peru. *Current Issues in Tourism*, 5(2), 71-93
- Marimin. 2005. Teknik dan Aplikasi Sistem Pakar dalam Teknologi Manajerial, IPB Press, Bogor
- Mihalic, T. 2000. Environmental management of a tourist destination: a factor of tourism competitiveness. *Tourism Management*. 21 (5). 65–78
- Miller, G. Rathouse, K, Scarles, C. Holmes, K. Tribe, J. 2010. Public understanding of sustainable tourism. *Annals of Tourism Research*, 37(3), 627-645.
- Ostrom, E. Schlager, F. 1996. *Governing the Commons*. Cambridge University Press, Cambridge
- Richins, H. Pearce, P. 2000. Influences on tourism development decisionmaking: coastal local government areas in eastern Australia. *Journal of Sustainable Tourism*, 8(3), 207-225
- Robertico, RC. 2004. A paradigm shift to a new strategy for small island economies: Embracing demands side economics for value enhancement and long term economic stability. *Tourism Management*. 20 (4). 12-30
- Romadhon, A. Yulianda, F. Bengen, DG. Adrianto, L. 2013b. Perencanaan Pembangunan Gugus Pulau Sapeken Secara Berkelanjutan : Penilaian Daya Dukung Kawasan Bagi Pengembangan Wisata *Jurnal Tataloka*. 15 (3): 217-227
- Romadhon, A. Yulianda, F. Bengen, DG. Adrianto, L. 2013a. SocioEcological System (SES) Assessment for Tourism at Sapeken Archipelago, Sumenep, Indonesia. *International Journal of Ecosystem*. 3(5): 106-114
- Singleton, S. 1998. *Constructing Cooperation: the Evolution of Institutions of Comanagement*. University of Michigan Press, Ann Arbor